



## Pengaruh Kondisi Sosial Ekonomi Terhadap Kesadaran Masyarakat Dalam Tertib Administrasi Kependudukan (Studi Kasus Kelurahan Gunung Anyar Tambak Kota Surabaya)

Alfi Aulia Majid<sup>1</sup>, Arief Bachtiar<sup>2</sup>, Kiky Asmara<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis

<sup>1,2,3</sup>Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

### Abstract

Received: 31 Juli 2024  
Revised: 06 Agustus 2024  
Accepted: 13 Agustus 2024

*Pengelolaan data administrasi kependudukan memegang peran penting yang harus ditekankan, sebab kurangnya pengawasan dapat memunculkan berbagai permasalahan di sejumlah sektor, termasuk aspek sosial, ekonomi, dan kehidupan lainnya. Administrasi kependudukan mencakup sejumlah tugas dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan proses pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan manajemen informasi terkait administrasi kependudukan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi tingkat kesadaran masyarakat dalam tertib administrasi kependudukan dan menguji pengaruh variabel sosial ekonomi terhadap kesadaran tersebut. Lokasi penelitian berada di Kelurahan Gunung Anyar Tambak, tempat penulis menjalani magang. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terstruktur dan observasi non-partisipan, melibatkan 87 responden sebagai sampel penelitian. Metode analisis yang diterapkan adalah binary logistic. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat di Kelurahan Gunung Anyar Tambak cenderung tinggi dalam menjalankan tertib administrasi kependudukan. Secara simultan, variabel seperti umur, status kependudukan, jenis kelamin, status pekerjaan, dan status kepemilikan rumah memiliki pengaruh terhadap kesadaran masyarakat dalam tertib administrasi kependudukan. Namun ketika dianalisis secara parsial, hanya variabel jenis kelamin dan status pekerjaan yang memiliki pengaruh signifikan terhadap kesadaran masyarakat dalam tertib administrasi kependudukan.*

*administrasi kependudukan, kondisi sosial ekonomi, kesadaran masyarakat*

### Keywords:

(\*)Corresponding Author: [auliamajid4@gmail.com](mailto:auliamajid4@gmail.com)<sup>1</sup>

**How to Cite:** Majid, A. A., Bachtiar, A., & Asmara, K. (2024). Pengaruh Kondisi Sosial Ekonomi Terhadap Kesadaran Masyarakat Dalam Tertib Administrasi Kependudukan (Studi Kasus Kelurahan Gunung Anyar Tambak Kota Surabaya). <https://doi.org/10.5281/zenodo.13761249>.

## PENDAHULUAN

Kota Surabaya adalah salah satu daerah di Indonesia yang memiliki populasi besar. Banyak masyarakat di Indonesia memilih pindah ke Surabaya karena tingkat peradaban kota yang tinggi dan lokasinya yang menguntungkan untuk menetap dan berkembang. Akibatnya, pengelolaan data administrasi kependudukan penting dilakukan karena jika tidak dikendalikan menimbulkan permasalahan di berbagai bidang termasuk sosial, ekonomi, dan aspek kehidupan lainnya. Administrasi kependudukan mencakup serangkaian tanggung jawab dalam mengelola dan menjalankan proses pendataan penduduk, pencatatan sipil, serta tata kelola penjelasan informasi terkait dengan administrasi kependudukan. Hasil dari administrasi kependudukan ini berfokus pada pelayanan publik dan perkembangan sektor lainnya. Diharapkan agar pelaksanaan kebijakan pengelolaan kependudukan dalam pelayanan administrasi kependudukan dapat terlaksana dengan sukses berdasarkan prinsip pelayanan publik yang baik, cepat, akurat, dan tepat. Karena pengelolaan kependudukan yang merupakan bagian dari aktivitas sehari-hari selalu

menjadi hal yang penting dalam seluruh aspek masyarakat Indonesia (Rosantika, 2023).

Sebagai bagian penting di Jawa Timur, Pemerintah Kota Surabaya berpartisipasi aktif dalam reformasi pelayanan publik dengan tujuan meningkatkan perekonomian daerah. Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Indonesia Anak (KIA), Akta Kematian, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK), dan layanan kependudukan lainnya merupakan beberapa layanan terkait dokumen administrasi yang dinilai sangat penting bagi masyarakat. Sebab, dokumen-dokumen tersebut sangat penting dan setiap orang wajib selalu memperbaruinya. Mengingat perubahan dan kemajuan masyarakat Indonesia, setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa lainnya memerlukan bukti untuk administrasi dan proses pencatatannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Secara luas bahwa masyarakat Indonesia telah memahami pentingnya memiliki dokumentasi tertulis untuk menentukan status seseorang pada peristiwa atau kejadian tertentu. Setiap orang harus melaporkan kejadian atau peristiwa tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) untuk mendapatkan status tersebut berupa Akta Catatan Sipil (Rahmawati & Fatchuriza, 2021).

Salah satu dari kejadian kependudukan yang dimaksud adalah penerbitan akta kelahiran yang menjadi catatan administrasi kependudukan pertama bagi individu saat lahir. Begitu juga saat mencapai usia 17 tahun, seseorang diharuskan melakukan perekaman E-KTP sebagai identitas kependudukan. Ketika seseorang meninggal, keluarganya perlu melaporkan peristiwa tersebut sebagai bagian dari kependudukan untuk mendapatkan akta kematian yang akan mengakibatkan penghapusan data kependudukan secara otomatis. Walaupun terlihat sebagai langkah yang sederhana, dalam praktiknya masih banyak orang yang tidak memperhatikannya dan meremehkannya. Namun, kenyataannya administrasi kependudukan adalah aspek yang harus diperhatikan dan dipatuhi. Hal ini menjadi kunci untuk mencapai visi pemerintah dalam menciptakan masyarakat yang sejahtera dan bahagia (Pramudita & Nur, 2023).

Untuk memberikan kualitas yang terbaik dalam pelayanan publik kepada masyarakat, pemerintah dituntut lebih inovatif, adaptif, dan tanggap terhadap perubahan yang disebabkan oleh pesatnya kemajuan teknologi. Dengan memanfaatkan layanan publik, teknologi informasi dan komunikasi dapat difungsikan sebagai sarana untuk mengatur interaksi antara kepuasan warga negara dan pemerintah. Pada tahun 2021 program Kalimasada (Kawasan Lingkungan Masyarakat Sadar Adminduk) diluncurkan oleh Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya sebagai langkah awal untuk mencapai tujuan dalam penerbitan dokumen kependudukan. Tujuan dari Kalimasada adalah untuk menciptakan ekosistem pemerintahan yang memahami pentingnya administrasi kependudukan dengan menggunakan teknologi digital, yaitu *Klampid New Generation* (KNG). Ada empat faktor yang menjadi indikator kesadaran pentingnya dokumen kependudukan tersebut yaitu pengetahuan mengenai manfaat pencatatan kependudukan, pemahaman terhadap manfaat penggunaan data kependudukan, kesadaran terhadap perlunya pembaruan informasi kependudukan, dan pengetahuan terkait pelayanan administrasi (A & Tukiman, 2023).

Terdapat sejumlah warga di Surabaya yang masih kurang tertib dalam aspek administrasi kependudukan, terutama dalam kurangnya kesadaran di kalangan penduduk Surabaya untuk melaporkan administrasi kependudukan kepada pihak berwenang setempat. Menurut informasi dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, pada tahun 2022 total masyarakat Kota Surabaya yang tidak memiliki KTP mencapai 47.779 orang atau setara dengan 2% dari total masyarakat yang wajib memiliki KTP sebanyak 2.251.947 orang. Di Kecamatan Gunung Anyar tercatat 781 orang atau 1,72% dari jumlah masyarakat wajib KTP sebanyak 45.454 orang.

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Sejauh mana tingkat kesadaran masyarakat di Kelurahan Gunung Anyar Tambak terkait dengan pelaksanaan tertib administrasi kependudukan?
2. Apakah variabel kondisi sosial ekonomi secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap kesadaran masyarakat dalam tertib administrasi kependudukan di Kelurahan Gunung Anyar Tambak?
3. Secara parsial, bagaimana pengaruh variabel kondisi sosial ekonomi, seperti umur, status kependudukan, jenis kelamin, status pekerjaan, dan kepemilikan rumah, terhadap kesadaran masyarakat dalam melaksanakan tertib administrasi kependudukan di Kelurahan Gunung Anyar Tambak?

## **KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS PENELITIAN**

Anggraini, (2017) menyatakan bahwa sebagai warga negara dan makhluk sosial para anggota masyarakat harus merujuk pada situasi di mana mereka menyadari hak dan tanggung jawab mereka dalam bentuk kesadaran masyarakat. Kesadaran ini juga secara erat terkait dengan tingkat pengetahuan, kesadaran, dan pemahaman. Memiliki pemahaman atau kesadaran terkait suatu situasi mencerminkan terbentuknya pemahaman di dalam pikiran tentang hal tersebut.

Administrasi dapat didefinisikan sebagai serangkaian tindakan yang perlu dilakukan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tindakan-tindakan tersebut melibatkan penentuan kebijakan, pembuatan rencana, penugasan tugas, penyusunan peraturan pelaksanaan, pengawasan, bimbingan pelaksanaan, dan penilaian yang bertujuan mencapai keberhasilan suatu usaha dalam mencapai tujuan organisasi (M. Irfan, 2021).

Secara teori, sistem ketatanegaraan yang sangat penting dalam penyelenggaraan statistik kependudukan oleh pemerintah adalah memasukkan sistem administrasi kependudukan sebagai salah satu komponen pentingnya. Setiap orang mempunyai hak atas pelayanan administrasi kependudukan terbaik yang tersedia bagi mereka. Elemen kuncinya antara lain meningkatkan kesadaran masyarakat dan mendorong keterlibatan aktif dalam perencanaan penciptaan sistem administrasi kependudukan. Pencatatan sipil dan pencatatan kependudukan merupakan komponen penting yang perlu ditangani dengan baik agar tujuan penyelenggaraan administrasi kependudukan dapat tercapai. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan keuntungan dalam upaya meningkatkan pembangunan dan tata kelola pemerintahan.

Pelayanan administrasi kependudukan menjadi kunci dalam mencapai keberhasilan berbagai usaha atau kegiatan jasa yang melibatkan pemenuhan

kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung. Performa pelayanan administrasi kependudukan memiliki dampak signifikan terhadap kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan kesejahteraan warga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dengan mengoptimalkan kualitas layanan administrasi kependudukan yang handal. Sebagai pelayan masyarakat, pemerintah diharapkan mampu menyediakan layanan yang mencakup berbagai aspek kebutuhan masyarakat termasuk dalam penyelesaian permasalahan kependudukan (Bimantara & Amalia, 2023).

Berdasarkan teori-teori yang dikemukakan di atas, maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:

1. Kelurahan Gunung Anyar tambak tergolong tinggi untuk pencapaian tingkat kesadaran masyarakat dalam tertib administrasi kependudukan.
2. Secara simultan, kondisi sosial ekonomi memiliki pengaruh signifikan terhadap kesadaran masyarakat dalam melaksanakan tertib administrasi kependudukan di Kelurahan Gunung Anyar Tambak.
3. Secara parsial, setidaknya satu variabel kondisi sosial ekonomi memiliki pengaruh signifikan terhadap kesadaran masyarakat dalam melaksanakan tertib administrasi kependudukan di Kelurahan Gunung Anyar Tambak.

## **METODE**

Guna memahami keterkaitan antara dua variabel atau lebih, penelitian ini memanfaatkan metode penelitian kuantitatif asosiatif. Masalah penelitian memandu penyusunan hipotesis yang didasarkan pada teori atau hasil sebelumnya dalam desain penelitian ini. Lokasi penelitian terletak di Kelurahan Gunung Anyar Tambak, Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesadaran masyarakat dalam tertib administrasi kependudukan di Kelurahan Gunung Anyar Tambak, serta faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran tersebut. Penelitian ini menggunakan dua macam variabel yaitu variabel independen dan dependen. Kesadaran masyarakat dalam tertib administrasi kependudukan (Y), variabel dependen dalam penelitian ini, dinilai dengan menggunakan skala *dummy* dengan nilai 1 menunjukkan tertib dan nilai 0 menunjukkan tidak tertib. Variabel independen yang digunakan adalah umur (X1) yang dinyatakan dalam satuan tahun, status kependudukan (X2) yang dinyatakan sebagai variabel *dummy* dengan nilai 1 yang menunjukkan penduduk asli dan nilai 0 yang menunjukkan bukan penduduk asli, jenis kelamin (X3) yang dinyatakan variabel *dummy* yang bernilai 1 menunjukkan laki-laki dan nilai 0 perempuan, status pekerjaan (X4) dinyatakan sebagai variabel *dummy* dengan nilai 1 menunjukkan pekerjaan dan nilai 0 mewakili tidak memiliki pekerjaan, dan status kepemilikan rumah (X5) ditentukan oleh variabel *dummy*, jika responden memiliki rumah sendiri maka nilai variabelnya adalah 1, dan jika itu adalah rumah orang lain, seperti rumah keluarga, kontrakan, atau kos maka diberi nilai 0.

Dalam penelitian ini penjelasan mengenai kesadaran masyarakat, umur, status kependudukan, jenis kelamin, status pekerjaan, dan status kepemilikan rumah semuanya merupakan sebagai data kualitatif. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya menyediakan data kuantitatif yang meliputi jumlah penduduk Kota Surabaya, jumlah penduduk Kelurahan Gunung Anyar Tambak, dan jumlah masyarakat Kota Surabaya berdasarkan kepemilikan KTP. Dengan menggunakan

kuesioner yang telah dibuat sebelumnya dan wawancara terorganisir, data primer dikumpulkan. Sedangkan data jumlah penduduk Kota Surabaya didapatkan melalui Badan Pusat Statistik, data kepemilikan KTP penduduk Kota Surabaya didapat melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, dan jumlah penduduk di Kecamatan Gunung Anyar yang wajib KTP termasuk dalam data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini.

Untuk menilai tingkat kesadaran masyarakat dalam tertib administrasi kependudukan di Kelurahan Gunung Anyar Tambak, digunakan *Logistic Regression Model* dengan *Statistical Package for the Social Sciences for Windows* sebagai teknik analisis data. Persamaan berikut dapat digunakan untuk menjelaskan bentuk model ekonometrik:

$$\text{Ln} \frac{P}{1-P} = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \mu$$

Dimana:

$P$	: Probabilitas tertib administrasi
$1 - P$	: Probabilitas kurang tertib administrasi
$X_1$	: Umur
$X_2$	: Status kependudukan
$X_3$	: Jenis kelamin
$X_4$	: Status pekerjaan
$X_5$	: Status kepemilikan rumah
$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5$	: Koefisien regresi variabel
$\mu$	: Standar Error (variabel pengganggu)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Rata-rata nilai yang digunakan untuk mengukur temuan studi mengenai tingkat kesadaran masyarakat, yang mencakup indikator kepemilikan dokumen, pelaporan kependudukan, dan keterlibatan dalam penyelesaian masalah. Hasil dari prosedur ini adalah angka-angka yang menunjukkan bagaimana Kelurahan Gunung Anyar Tambak telah menerapkan sistem pemerintahan tertib administrasi kependudukan. Nilai rata-rata jawaban dari mereka yang menjawab “Ya” pada kuesioner digunakan untuk mengetahui tingkat kesadaran masyarakat. Berikut penjelasan mengenai kriteria tingkat kesadaran masyarakat:

1. Sangat rendah, bila memiliki rata-rata:  $\leq 20$
2. Rendah, bila memiliki rata-rata: 20,1 – 40
3. Sedang, bila memiliki rata-rata: 40,1 – 60
4. Tinggi, bila memiliki rata-rata: 60,1 – 80
5. Sangat tinggi, bila memiliki rata-rata: 80,1 – 100

Berikut adalah rangkuman dari kesadaran masyarakat dalam tertib administrasi kependudukan.

Tabel 1. Kesadaran Masyarakat dalam Tertib Administrasi Kependudukan di Kelurahan Gunung Anyar Tambak Kota Surabaya

No	Indikator Kesadaran	Rata-rata	Kriteria
1	Kepemilikan Dokumen	98,27	Sangat Tinggi
2	Pelaporan Kependudukan	96,55	Sangat Tinggi
3	Pemecahan Masalah Kependudukan	96,55	Sangat Tinggi
Rata-rata		97,12	Sangat Tinggi

Sumber: Hasil olah data, 2023

Berdasarkan pada data Tabel 1, nilai rata-rata seluruh indikator kesadaran seperti kepemilikan dokumen, pelaporan kependudukan, dan kesadaran dalam menangani permasalahan kependudukan mencapai 97,12 persen. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat tingkat kesadaran masyarakat yang sangat tinggi dalam tertib administrasi kependudukan di Kelurahan Gunung Anyar Tambak.

Tabel *Omnibus Test of Model Coefficients* dapat digunakan untuk menentukan apakah variabel independen dalam model memiliki dampak bersama secara simultan pada kesadaran masyarakat dalam tertib administrasi kependudukan, seperti yang dijelaskan berikut.

Tabel 2. *Omnibus Test of Model Coefficients*

		Chi-square	df	Sig.
Step 1	Step	19.694	5	.001
	Block	19.694	5	.001
	Model	19.694	5	.001

Tabel 3. Kesesuaian Prediksi dan Hasil Observasi

Observed		Predicted		Percentage Correct	
		Tertib Administrasi Kependudukan	Tidak Tertib		
Step 1	Tertib Administrasi Kependudukan	Tidak Tertib	5	6	45.5
		Tertib	1	75	98.7
Overall Percentage					92.0

Berdasarkan tabel diatas, nilai Chi-Square untuk pengujian simultan sebesar 19,694 dan nilai p value Chi-Square sebesar 0,001. Sehingga ditentukan bahwa variabel bebas yang digunakan mempunyai pengaruh signifikan secara simultan terhadap variabel terikat yaitu kesadaran masyarakat dalam tertib administrasi kependudukan karena nilai tersebut kurang dari 5% maka menolak Ho pada taraf signifikansi 5%. Tabel 3 memberikan rincian lebih lanjut mengenai besarnya dampak simultan, hal ini menunjukkan kesesuaian 92 persen antara prediksi model dan temuan penelitian. Selain itu, dengan menggunakan Tabel *Variables in the equation* dapat ditentukan apakah variabel independen dalam model mempunyai pengaruh secara parsial terhadap kesadaran masyarakat dalam tertib administrasi kependudukan.

	B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Umur	-.003	.033	.009	1	.925	.997

Step 1 <sup>a</sup>	Status Kependudukan	1.632	1.144	2.036	1	.154	5.114
	Jenis Kelamin	-2.514	1.123	5.010	1	.025	.081
	Status Pekerjaan	3.896	1.193	10.658	1	.001	49.194
	Status Kepemilikan Rumah	-.012	1.000	.000	1	.990	.988
	Constant	.218	1.604	.018	1	.892	1.243

Dapat disimpulkan bahwa pada variabel umur (X1) tidak mempunyai pengaruh secara parsial terhadap kesadaran masyarakat terhadap tertib administrasi kependudukan di Kelurahan Gunung Anyar Tambak, sebab signifikansi variabel umur p-value sebesar  $0,925 > 0,05$ . Temuan ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat dalam tertib administrasi kependudukan tidak dipengaruhi secara signifikan oleh variabel umur. Kesadaran masyarakat terhadap tertib administrasi kependudukan juga tidak dipengaruhi secara signifikan oleh status kependudukan (X2). Nilai p-value signifikansi sebesar 0,154 untuk variabel status kependudukan, menunjukkan bahwa nilai lebih besar dari nilai signifikansi sebesar 0,05. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kesadaran masyarakat dalam tertib administrasi kependudukan tidak dipengaruhi oleh status kependudukan.

Sebaliknya, jenis kelamin (X3) terbukti signifikan mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam tertib administrasi kependudukan. Nilai p-value signifikansi variabel jenis kelamin sebesar  $0,025 < 0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat dalam tertib administrasi kependudukan dipengaruhi oleh jenis kelamin. Nilai p-value signifikansi variabel status pekerjaan (X4) sebesar 0,003 lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05, menunjukkan bahwa status pekerjaan juga berpengaruh signifikan terhadap kesadaran masyarakat dalam tertib administrasi kependudukan.

Sedangkan kesadaran masyarakat dalam tertib administrasi kependudukan tidak dipengaruhi secara signifikan oleh status kepemilikan rumah (X5). Status kepemilikan rumah mempunyai nilai p-value signifikansi sebesar  $0,990 > 0,05$  yang berarti tidak terdapat hubungan yang signifikan antara variabel ini dengan kesadaran masyarakat terhadap tertib administrasi kependudukan.

## KESIMPULAN

1. Tingkat kesadaran masyarakat yang sangat tinggi, yaitu 97,12 persen, terhadap tertib administrasi kependudukan telah dicapai di Kelurahan Gunung Anyar Tambak Kota Surabaya. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat terlibat dan sadar akan pentingnya memelihara catatan kependudukan yang komprehensif.
2. Kesadaran masyarakat akan pentingnya tertib administrasi kependudukan dipengaruhi secara simultan oleh faktor umur, status kependudukan, jenis kelamin, status pekerjaan dan status kepemilikan rumah.
3. Umur, status kependudukan, dan status kepemilikan rumah secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kesadaran masyarakat luas akan perlunya tertib administrasi kependudukan.
4. Di sisi lain, jenis kelamin secara parsial terbukti berdampak pada kesadaran masyarakat mengenai pelaksanaan tertib administrasi kependudukan. Perempuan cenderung lebih sadar akan administrasi kependudukan karena kewajiban mengikuti suami. Kewajiban ini mendorong keterlibatan aktif dalam

pendaftaran keluarga, pembuatan dokumen resmi, dan pemahaman hukum kependudukan. Kesadaran administratif yang ditingkatkan memberikan perempuan kekuatan dan pengetahuan untuk mengelola urusan keluarga dan kependudukan secara mandiri.

5. Selain itu, status pekerjaan secara parsial juga terbukti berdampak pada kesadaran masyarakat mengenai pelaksanaan tertib administrasi kependudukan. Orang yang bekerja cenderung lebih tertib dalam administrasi kependudukan karena persyaratan administratif dan keteraturan di lingkungan kerja. Sebagai hasilnya, partisipasi dalam lingkungan kerja yang menekankan keteraturan dapat menjadi pendorong positif bagi individu untuk lebih tertib dan sadar dalam administrasi kependudukan pribadi mereka.

### **SARAN**

1. Diperlukan upaya terus-menerus dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang proses pengurusan dan perubahan data kependudukan, RT dan RW dapat menggelar kegiatan sosialisasi dan edukasi yang berkelanjutan melalui acara masyarakat seperti pertemuan tetangga sebagai kesempatan interaktif untuk menyampaikan pesan administrasi kependudukan kepada seluruh keluarga dan anggota masyarakat.
2. Pemerintah kelurahan disarankan oleh Pemerintah Kota untuk meningkatkan ketepatan dan ketelitian dalam pengumpulan data demografi di wilayahnya masing-masing. Pemerintah pusat dapat menerapkan kebijakan yang tepat untuk menangani permasalahan kependudukan yang muncul dengan mengumpulkan data secara menyeluruh.
3. Pemerintah Kota melakukan pengawasan terhadap pemerintah kelurahan untuk memastikan pengawasan yang efektif terhadap pelayanan dan kinerja kelurahan. Hal ini karena pelayanan merupakan faktor penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pelaksanaan tertib administrasi kependudukan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- A, P., & Tukiman. (2023). *Mewujudkan Masyarakat Tertib Administrasi Kependudukan Melalui Program Kalimasada Di Kelurahan Genting Kalianak, Kota Surabaya*. 9(20), 21–27.
- Anggraini, N. (2017). *Public Administration Journal Vol.1 No. 2 (2017)*. 1(2), 174–189.
- Bimantara, J. B., & Amalia, D. (2023). *Kegiatan sosialisasi program kawasan lingkungan masyarakat sadar adminduk di wilayah kelurahan sambikerep 1,2*. 3(2), 342–344.
- M. Irfan. (2021). Implementasi Kebijakan Administrasi Kependudukan Di Kota Bima. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 18(2), 22–41. <https://doi.org/10.59050/jian.v18i2.141>
- Pramudita, D. W., & Nur, D. I. (2023). *Optimalisasi Program KALIMASADA Melalui Aplikasi Klampid New Generation ( KNG ) Bersama MSIB Batch 4 Di Kelurahan Wonokromo*. 2(4), 87–94.
- Rahmawati, M. P., & Fatchuriza, M. (2021). Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Dalam Genggam (Pak Dalman) Berbasis Aplikasi Di

Kabupaten Kendal. *AS-SIYASAH: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 6(2), 28. <https://doi.org/10.31602/as.v6i2.5647>

Rosantika, A. P. (2023). *Penerapan Progam Kalimasada Oleh Disdukcapil Surabaya Di Lingkup Kelurahan*. 3(02), 31–41.